



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA/NAGARI (DPMD/N)
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (Renja DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 telah dapat diselesaikan. Penyusunan Renja merupakan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun.

Dokumen Renja DPMD/N Tahun 2025 disusun berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya penyusunan Renja DPMD/N Tahun 2025 juga berpedoman pada Renstra DPMD/N Tahun 2021-2026, RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, RPJPD Kab. Lima Puluh Kota 2005-2025, serta telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sehingga Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun diharapkan dapat mencapai Tujuan, Sasaran Kinerja DPMD/N Tahun 2025 dan selaras, berkesinambungan serta sinergis dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dalam penyusunan Renja ini terdapat dukungan dari berbagai pihak. Atas dukungan dan kontribusi yang diberikan kami mengucapkan terima kasih. Penyajian Renja ini masih belum sempurna, saran dan perbaikan diharapkan untuk penyusunan dokumen Renja di masa mendatang. Demikianlah Renja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 ini disusun, semoga semua yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Payakumbuh, Agustus 2024

**KEPALA DPMD/N
KAB. LIMA PULUH KOTA**

ENDRA AMZAR,SH
NIP. 19680906 199603 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
NASKAH PERATURAN BUPATI	
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL	<i>iii</i>
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD/N	II-1
TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD/N	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	II-18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD/N	II-21
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumateta Barat Dan Kabupaten Lima Puluh Kota	III-1
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja DPMD/N	III-2
3.3 Program Dan Kegiatan	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD/N dan Pencapaian Renstra DPMD/N s/d Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2026	II-20
Tabel 2.3	Status Desa/Nagari Di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-21
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	II-24
Tabel 3.1	Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	III-1
Tabel 3.2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	III-6
Tabel 3.3	Program Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	III-6
Tabel 3.4	Rekapitulasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan DPMDN Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	III-7
Tabel 4.1.	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan implementasi dari UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 1 ayat 30, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Proses penyusunan Rencana Perangkat Daerah disusun mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di Tingkat Kabupaten. Sedangkan untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan Tahun ke-4 dan harus menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 s.d. 2026. Dengan mempedomani Visi dan Misi pembangunan daerah tahun 2021 s.d. 2026 dan Rencana Strategis DPMD/N Tahun 2021 s.d. 2026. Rencana kerja DPMD/N disinkronkan dengan Renja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Renja DPMD Propinsi Sumatera Barat. Rencana Kerja ditindak lanjuti dengan penyusunan Pra RKA Tahun 2025. Program dan kegiatan yang disusun disinkronkan dengan program Prioritas yang ada dalam RPJMD Tahun 2021 s.d. 2026 dengan memuat hasil

Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten serta pokok pokok pikiran DPRD. Dengan demikian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Selanjutnya DPMD/N sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) DPMD/N untuk Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 16 ayat 2, proses penyusunan Renja melalui tahapan sebagai berikut: (i) persiapan penyusunan; (ii) penyusunan rancangan awal; (iii) penyusunan rancangan; (iv) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (v) perumusan rancangan akhir dan (vi) penetapan. Seluruh tahapan ini dimulai pada bulan Desember 2023, dan akan selesai pada bulan Juli 2024.

Tahap persiapan penyusunan Renja meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan persiapan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2023.

Selanjutnya tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Sesuai dengan pasal 126, rancangan awal ini berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2025 (n-1). Sesuai dengan pasal 126 ini juga penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat Februari 2024. Sehingga untuk rancangan awal Renja DPMD/N Tahun 2025, direncanakan selesai bulan Februari 2024. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja

dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Tahap ketiga dalam penyusunan Renja DPMD/N Tahun 2025 adalah tahap penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bapelitbang paling lambat minggu keempat bulan Februari 2024.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Namun berdasarkan kesepakatan Bapelitbang dengan OPD untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Forum, maka Forum Perangkat Daerah dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di Bapelitbang. Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir merupakan tahap selanjutnya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam

Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah tahap penetapan. Rancangan akhir Renja DPMD/N Tahun 2025 disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim paling lambat April 2024. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh DPMD/N, rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan perkada tentang RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

RKPD Tahun 2025 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025. Seperti halnya RKPD 2025, maka Renja DPMD/N Tahun 2025 ini akan menjadi Rencana Kerja Tahun ke-4 dan harus menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari periode tahun 2021-2026. Renja DPMD/N ini selanjutnya juga akan ditindak lanjuti sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD yaitu, RKA, KUA/PPAS dan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 Nomor 15).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026.
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi Bupati/Wakil Bupati Periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021–2026 yang menjadi tanggung jawab DPMD/N secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPDP Tahun 2025 sesuai dengan urusan dan kewenangan DPMD/N.
3. Menyediakan dokumen sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan DPMD/N untuk Tahun 2025.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2025.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di DPMD/N.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMD/N pada Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 mengacu pada Pasal 129 Permendagri 86 Tahun 2017, yang terdiri dari lima Bab dengan uraian sebagai berikut:

I. Pendahuluan.

Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2025, landasan hukum yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Renja, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja.

II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun Lalu.

Bab dua ini memberikan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022-2023 dan capaian terhadap target Renstra DPMD/N hingga Tahun 2024, analisis kinerja pelayanan DPMD/N, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD/N, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

III. Tujuan dan Sasaran DPMD/N.

Bab tiga memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja DPMD/N, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan.

Bab ini menguraikan Rencana Kerja, Target dan Indikator Kinerja serta Pendanaan yang dibutuhkan.

V. Penutup.

Bab kelima merupakan ketentuan penutup.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ NAGARI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD/N

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun 2023 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2024 (tahun n-1), mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DPMD/N berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPMD/N tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun 2023 dan realisasi Renstra DPMD/N mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan DPMD/N dan/atau realisasi APBD untuk DPMD/N. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra DPMD/N.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Kondisi anggaran DPMD/N tahun 2023 diawal Rp. 3.588.437.140,- kemudian pada perubahan anggaran menjadi Rp. 3.675.228.476,-. Terdapat penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan. Pada anggaran 2023 tidak ada

Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan. Semua Program/Kegiatan berjalan sesuai Target yang ditetapkan.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran Yang Direncanakan

Pada Tahun 2023, program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.011.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.6.996.300,-(99,78%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Rencana Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2023, LKPJ, LPPD, LKjIP, SPIP,dan Laporan Keuangan dengan capaian kinerja Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.252.000,-dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.245.000,- (99,78%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya DPA- SKPD Tahun Anggaran 2023 , dengan capaian kinerja Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.236.000,-dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.236.000,-(100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya laporan capaian realisasi fisik keuangan, dengan capaian kinerja Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.341.802.576,-dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.310.260.017,-(98,88%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dengan Capai Kinerja Terlaksananya Administrasi Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.176.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.170.000,- (99,49%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD yaitu Administrasi Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.619.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.617.000,- (99,88%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan Capai Kinerja yaitu Administrasi Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.465.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.459.000,- (99,76%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah dengan Capai Kinerja yaitu Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai pada SKPD yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.500.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Laporan SKP Online.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang didanai melalui APBD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 600.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 600.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai (100%). Keluarkan dari Sub Kegiatan ini adalah penyediaan Handsanitizer.
- b. Penyediaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang didanai melalui APBD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.411.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.400.000,- (99,52%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai (100%). Keluarkan dari Sub Kegiatan ini adalah pemeliharaan Komputer dan Printer.
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang didanai melalui APBD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 600.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 600.000,-(100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluarkan dari Sub Kegiatan ini Alat Tulis Kantor (ATK) dan Bahan Kekuatan Kantir lainnya, dengan capaian kinerja terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah.
- d. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang didanai melalui APBD dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.375.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.372.500,- (99,82%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluarkan dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya Makan Minum rapat dengan capaian kinerja terlaksananya administrasi Umum Perangkat Daerah.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 515.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 510.000,- (99,03%) serta realisasi fisik kegiatan 99,41%. Keluarkan dari Sub Kegiatan ini adalah Materai dan 1 Buah Buku Cek, dengan capaian kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.206.250,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.170.394,- (99,83%) serta realisasi fisik kegiatan 99,99%. Keluarkan dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan jasa

komunikasi sumber daya air, listrik, yaitu listrik 12 bulan, telepon 12 bulan dan internet 12 bulan, dengan capaian kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.500.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan 100%. Keluarkan dari Sub Kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan Jasa Pelayanan Kantor Yaitu Honorarium Tenaga Administrasi 4 Bulan, Tenaga Operator Komputer 12 Bulan, Tenaga Pelayanan umum (Petugas K3) Serta Tenaga Sopir, dengan capaian kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 119.269.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 119.203.887 (99,94%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,94 %. Keluarkan dari Sub Kegiatan ini adalah Jasa Service ,Penggantian Suku Cadang,BBM, Pembayaran STNK Kedaraan dinas serta Pelumas Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua dengan capaian kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

II. Program Administrasi Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.256.000.- dan realisasi keuangan sebesar 5.250.000,- (99,89%),serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluarkan dari Sub Kegiatan ini adalah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.230.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.230.000,- (100%), serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%.

Keluarkan dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000.- dan realisasi keuangan sebesar 4.500.000,- (97,45%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluarkan dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran honorarium THL.
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.303.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.300.000,- (99,94%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluarkan dari Sub Kegiatan ini adalah Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.500.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluarkan dari Sub Kegiatan ini adalah pembayaran honorarium THL Batas Desa .

III. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 995.957.060.- (99,60%), serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluarkan dari Sub Kegiatan ini adalah, Bimtek KP-SPAM, Bimtek KAN, Bimtek Dasawisma, Bimtek PKK, Coaching Klinik, Bimtek KPM, Bimtek Bumrag, Bimtek Bamus, Bimtek Prodeskel, Bimtek Pengelolaan Keuangan, Bimtek Peningkatan Kapasitas ASN, Jambore PKK dan Ghatering PKK.

- b. Fasilitasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Desa yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi Rp. 3.000.000,- (100%) serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah pembayaran honorarium THL PKK.
- c. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang didanai melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.900.000.- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 108.848.000.- (99,95%), serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Publikasi PKK dalam bentuk Baliho, Roll Bunner dan Kalender PKK.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Pada Tahun 2023 tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat pada DPMD/N terlaksana dengan baik. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan sampai dengan **Desember 2023** dapat dicapai **99,03%**, dan realisasi fisik sampai dengan Desember 2023 dapat dicapai **100%**. Tetapi ada beberapa subkegiatan yang tidak terlaksana sehingga tidak dapat mencapai target kinerja.

Hasil evaluasi selanjutnya yaitu, terhadap pencapaian target dan realisasi Renstra DPMD/N sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023. Berikut dijelaskan tingkat pencapaian target dan realisasi program/kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 98,75%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target Renstra 2023 adalah sebesar 100%.**
2. **Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 99,96%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 100%. Tingkat**

capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target Renstra 2023 adalah sebesar 100%.

- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**, dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 99.63%. Tingkat capaian realisasi fisik sebesar 100%. Tingkat capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan target Renstra 2023 adalah sebesar 100%.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja DPMD/N Tahun 2023-2024 dan pencapaian kinerja Renstra DPMD/N, dapat dilihat bahwa capaian realisasi keuangan terhadap target Renstra tinggi. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sampai dengan Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD/N dan Pencapaian Renstra DPMD/N s/d Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Ketuntasan Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		100%	100%	78.84	100%		
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%		80%	80%	100	85%		
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	9 Dokumen	4 dok	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	8 dok	88%
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	6 Dokumen	4 dok	-	-	-	-	4 dok	66%
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	6 Dokumen	3 dok	-	-	-	-	3 dok	50%
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	6 Dokumen	4	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	6 dok	100%
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	6 Dokumen	3	-	-	-	-	3 dok	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.01.06	Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LKJIP, SPIP, LKPJ, SPBE, dan PK)	29 Dokumen	16 dok	4 Dokumen	4 Dokumen	100	5 Dokumen	25 dok	86%
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	24 Laporan	12 lap	-	-	-	4 Laporan	16 Lap	66%
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100%		100%	100%	81.09	100%		
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	143 ASN	77 ASN	31 ASN	31 ASN	100	31 ASN	139 ASN	97
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi tugas ASN	60 Bulan	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Yang diverifikasi	15000 Dokumen	7600 dok	2000 dok	1850 dok	92	2000 Dokumen	11450 dok	76%
2.13.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi akuntansi SKPD/ DPMDN	60 Bulan	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan Keuangan akhir tahun DPMDN yang disusun	6 Dokumen	3 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5 dok	83%
2.13.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen LHP yang ditindak lanjuti	26 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	60 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	6 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100%		100%	100%	12.30	100%		
2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9 Dokumen	4 dok	-	-	-	-	4 dok	44%
2.13.01.2.03.01	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian BMD SKPD	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.03.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	13 Laporan	4 Lap	3 Laporan	3 Laporan	100	2 Laporan	9 Lap	69 Lap
2.13.01.2.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan penatausahaan BMD SKPD	60 Bulan	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%		0%	0%	0.00	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin Absensi yang diadakan	5 Unit		-	-	0.00	1 Unit		
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	373 Stel		-	-	0.00	48 Stel		
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	245 Dokumen		-	-	0.00	47 Dokumen		
2.13.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi sistem informasi kepegawaian	60 Bulan		-	-	0.00	12 Bulan		
2.13.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen SKP ASN	144 Dokumen	59 dok	-	-	0.00	31 Dokumen	90 dok	62%
2.13.01.2.05.06	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Melaksanakan Pindah Tugas	10 ASN	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.05.07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 ASN		-	-	0.00	5 ASN	-	-
2.13.01.2.05.08	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 ASN	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.05.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 ASN	-	27	40	148%	-	40	160%
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100%		100%	100%	52.27	100%		
2.13.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang disediakan	36 Jenis	20 jenis	4 jenis	4 jenis	100	6 Jenis	30 jenis	83%
2.13.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis	12 jenis	6 jenis	8 jenis	133	6 jenis	26 jenis	86%
2.13.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	18 Paket	18 paket	-	-	-	-	18 paket	100%
2.13.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah ATK dan Alat Kebersihan kantor yang disediakan	36 Paket	18 paket	6 paket	6 paket	100	6 Paket	30 paket	83%
2.13.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	48 Jenis	28 jenis	10 jenis	10 jenis	100	10 jenis	48 jenis	100%
		Jumlah penggandaan yang disediakan	17990 Lembar	12300 lembar	1100 lembar	1100 lembar	100	1250	14650 lembar	81%
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	1080 Eksemplar	-	-	-	-	300 Eks	300 Eks	27%
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang disediakan	72 Bulan	-	-	-	-	-	-	
2.13.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	5650 Orang	2560 orang	720 orang	610 orang	85%	800 orang	3970 orang	70%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi yang disusun	900 Laporan	900 lap	230 lap	210 lap	91%	200 lap	1310 lap	145%
		Jumlah makan minum rapat yang disediakan	1800 Porsi	800 porsi	270 porsi	210 porsi	77%	600 porsi	1610 porsi	89%
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan retensi arsip substantif/ arsip dinamis yang disusun	6 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi SPBE	48 Bulan	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	6 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang diadakan	14 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah filling kabinet yang diadakan	93 Unit	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah kursi tamu/sofa yang diadakan		-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah lemari arsip yang diadakan		-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah meja 1/2 biro yang diadakan		-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laptop ,Komputer PC, Printer yang diadakan	57 Unit	4 unit	-	-	-	-	4 unit	7%
2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	6 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana/prasarana a gedung kantor atau bangunan lainnya (gudang,dll) yang diadakan	5 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana/prasarana a pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (tempat parkir, dll) yang diadakan	5 Paket	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%	100%	80.70	100%		
2.13.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	24 jenis	16 jenis	6 jeni	3 jenis	50%	6 jenis	25 jenis	104%
2.13.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	72 Rekening	36 Rekening	12 rekening	12 rekening	100%	2 rekening	60 rek	83%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	72 Rekening	36 Rekening	12 rekening	12 rekening	100%	2 rekening	60 rek	83%
		Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	72 Rekening	36 Rekening	12 rekening	12 rekening	100%	2 rekening	60 rek	83%
2.13.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	155 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	105 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD	100%		100%	100%	66.94	100%		
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	114 Unit	57 unit	19 unit	19 unit	100	19 Unit	95 unit	83%
2.13.01.2.09.05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	5 Unit	5 unit	-	-	-	-	5 unit	100%
2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel/inventaris kantor	625 Paket	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan alat rumah tangga/ kantor lainnya	30 Paket	10 paket	10 Paket	10 Paket	100	10 Paket	30 paket	100%
		Jumlah pemeliharaan komputer/ laptop/ printer	115 Unit	23 unit	5 unit	7 unit	140	3 Unit	33 unit	28%
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	6 Unit	1 unit	--	-	-	1 Unit	2 unit	33%
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	51 Paket	-	-	-	-	-	-	-
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	60 Paket	-	-	-	-	-	-	-
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						56.80			
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa	12,5%	-	-	-	-	-	-	-
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase nagari yang difasilitasi dalam penataan desa	12,5%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase nagari yang ifasilitasi dalam Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	12,5%	-	-	-	-	-	-	-
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Kerjasama antar Nagari/Desa	100%		0,2%	0,2%	49.77	54,43%		
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan	158 Nagari	kawasan					1 kawasan	
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dalam Kabupaten	79 Nagari		-	-	-	-		
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan kerjasama dengan pihak ketiga	79 Nagari		-	-	-	-		
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	1 Kawasan Perdesaan	1 kawasan					1 kawasan	100%
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan			100%	100%	51.85	100%		
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	68%		56%	56%	51.85	58%		
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Wali Nagari yang mengikuti rapat kerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	79 Wali Nagari	79 WN	0	0	0.00	100%	79 WN	100%
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah aparatur pemerintahan nagari yang mengikuti pelatihan bimtek penyusunan produk hukum desa /nagari	796 Aparatur	158 aparat ur	79 aparatur	79 aparatur	100	79 aparatur	316 aparatur	39%
		Persentase fasilitasi/ pendampingan/ monitoring penyusunan produk hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari	95%		-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Nagari Dengan Penyelesaian RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat waktu	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
		Persentase evaluasi rancangan peraturan nagari tentang APBNagari tepat waktu di kecamatan	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
		Persentase pedoman dan regulasi nagari dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disusun	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	persentase aparaturn pemerintahan nagari yang terlatih dalam pengelolaan keuangan nagari berbasis aplikasi SISKEUDES	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
		Persentase pembinaan serta pemantauan Dana Desa yang terlaksana	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
		Persentase Koordinasi, Monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan keuangan nagari yang terlaksana	100%	100%	-	-	-	-	-	100%
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	79 nagari		79 Nagari	79 Nagari	36.96	79 Nagari		100%
		Jumlah nagari yang terfasilitasi dan terbina dalam penataan administrasi pemerintahan nagari	13 Nagari		13 Nagari	13 Nagari		13 Nagari		100%
2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Nagari dan Kecamatan yang difasilitasi dalam pelaksanaan Musyawarah (Musrenbang) Desa/Nagari dan Kecamatan	79 Nagari dan 13 Kec		79 Nagari dan 13 Kec	79 Nagari dan 13 Kec	62.17	79 Nagari dan 13 Kec		100%
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah rancangan/ dokumen Pernag yang dievaluasi pada tahun berjalan	1422 Dokumen		237 rancangan/ dokumen	237 rancangan/ dokumen	94.66	237 rancangan/ dokumen		
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	95%		80%	80%	53.68	82%		
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang Terbentuk	12 BumDesa		0	0		4 BumDesa		
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala	Jumlah Nagari Yang Melaksanakan Pemilihan Wali	79 Nagari		18 Nagari	18 Nagari	0.00	52 Nagari		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Desa	Nagari Serentak								
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	79 Nagari		-	-	0.00	79 Nagari		100%
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan/monitring penyusunan profil nagari selama tahun berjalan	79 Nagari		26 Nagari	26 Nagari	100.00	39 Nagari		
		Jumlah nagari yang menyampaikan laporan monografi nagari tepat waktu dan sesuai ketentuan	79 Nagari		40 Nagari	40 Nagari		45 Nagari		
		Jumlah nagari dengan status swadaya	0		3 Nagari	3 Nagari		2 Nagari		
		Jumlah nagari dengan status swasembada	31 Nagari		27 Nagari	27 Nagari		28 Nagari		
		Persentase nagari dengan status mandiri	14%		5%	5%		5%		
		Persentase nagari dengan status tertinggal	0%		2.5%	2.5%		2.5%		
2.13.04.2.01.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparaturn pemerintahan nagari yang mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa	1250 orang		0	0	0.00	250 orang		
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase nagari yang mengikuti Bimtek pengelolaan aset dan kekayaan nagari berbasis aplikasi	10000%		85%	85%	89.28	85%		
2.13.04.2.01.14	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah Anggota Bamus Nagari yang mengikuti pelatihan dan rapat koordinasi	719 orang		0	0	0.00	79 orang		
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas nagari/desa	79 nagari		2 nagari	2 nagari	28.94	2 nagari		
2.13.04.2.01.16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Persentase Nagari yang Menyampaikan Laporan Penyelenggara n Pemerintahan Nagari (LPPN) dan Laporan Badan Pemusyawaratan Desa/Nagari (Bamus Nagari)	100%		25%	25%	79.90	50%		
		Persentase Bamus Nagari yang menyampaikan Kinerja Bamus Nagari Tepat	100%		60%	60%	0.00	70%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Waktu dan Sesuai Ketentuan berlaku								
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Nagari Cepat berkembang pada tahun berjalan	54		44	44	57.90	46		
		Jumlah nagari berkembang pada tahun berjalan	33		35	35		34		
		Jumlah Nagari terbaik pada penilaian lomba nagari tingkat kabupaten	3		3	3		3		
		Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap nagari yang mengikuti Per lomba Nagari /Desa & Kelurahan Tingkat Propinsi /Regional.	48 Kegiatan		5	5		7 Kegiatan		
		Jumlah Inovasi dan Produk Unggulan Nagari yang ditampilkan pada temu karya dan pekan inovasi desa dan kelurahan Pendiskel Tk. Nasional	18 Inovasi		3 Inovasi	3 Inovasi		3 Inovasi		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Nagari/Adat	75%		50%	50%	59.94	55%		
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Pemberdayaannya	75%		50%	50%	59.94	55%		
2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat, lembaga Adat (Lembaga Adat Aktif)	6 Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		1 Kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat	1 Kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat	40.21	1 Kegiatan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat		
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	711 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)		79 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)	79 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)	89.47	79 kader dari 2713 kader posyandu (2,9 %)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan pembinaan	8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)		8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)	8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)		8 Lembaga adat yang berada dinagari (10%)		
		Jumlah KPM, RDS, yang mendapatkan pembinaan	95 RDS/KPM (100%)		95 RDS/KPM (100%)	95 RDS/KPM (100%)		95 RDS/KPM (100%)		
		Jumlah Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kabupaten	11 X Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kab dalam 6 tahun		1 X Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kab dalam 1 tahun	1 X Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kab dalam 1 tahun		2 X Rakor Pokjanel Posyandu Tk Kab dalam 1 tahun		
		Persentase Posyandu Aktif Mandiri	20 % Posyandu aktif mandiri		12 % Posyandu aktif mandiri	12 % Posyandu aktif mandiri		13 % Posyandu aktif mandiri		
		Jumlah kegiatan KKN PT yang difasilitasi	Fasilitasi KKN 15 Perguruan Tinggi		Fasilitasi KKN 10 Perguruan Tinggi	Fasilitasi KKN 10 Perguruan Tinggi		Fasilitasi KKN 12 Perguruan Tinggi		
		Jumlah Lembaga PKK, Nagari yang mendapatkan pembinaan	20 Lembaga PKK Dinagari (25%)		20 Lembaga PKK Dinagari (25%)	20 Lembaga PKK Dinagari (25%)		20 Lembaga PKK Dinagari (25%)		
		Jumlah Pokja Posyandu Aktif	5 Pokja Poyandu di Nagari		5 Pokja Poyandu di Nagari	5 Pokja Poyandu di Nagari		5 Pokja Poyandu di Nagari		
		Jumlah Regulasi yang dibuat Tentang Fasilitasi Penataan , Pemberdayaan dan Penggunaan Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa tk Kabupaten	1 Regulasi (Perbud)		1 Regulasi (Perbud)	1 Regulasi (Perbud)		1 Regulasi (Perbud)		
			Hibah LKAAM (6 Kegiatan)		Hibah LKAAM (1 Kegiatan)	Hibah LKAAM (1 Kegiatan)		Hibah LKAAM (1 Kegiatan)		
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPMD yang mengikuti pelatihan	359 KPMD		20 KPMD	20 KPMD	47.95	40 KPMD		
		Persentase LPM Aktif	80%		58%	58%		60%		
		Jumlah kelompok BP-SPAMS dan KPP-FASUM yang mendapatkan pembinaan, penilaian, dan monev	141 KP SPAM		20 KSPAMS	20 KSPAMS		60 KPSPAM		
		Jumlah Rakor P3MD yang dilaksanakan terkait Pendampingan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	11 Kali Rakor		1 Kali Rakor	1 Kali Rakor		2 Kali Rakor		
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro Yang dibina	40 Kelompok		0	0	0.00	26 Kelompok		
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	JumLah Posyantek Yang Terbentuk	79 Posyantek		2 Posyantek	2 Posyantek	21.60	6 Posyantek		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d Tahun 2024	
					Target Renja OPD Tahun 2023	Realisasi Renja OPD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Gelar TTG yang diikuti	18 Gelar TTG		3 Gelar TTG	3 Gelar TTG		3 Gelar TTG		
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Nagari yang terfasilitasi pelaksanaan dan monitoring kegiatan BBGRM	79 Nagari		79 Nagari	79 Nagari	57.33	79 Nagari		100 %
		Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pencanangan BBGRM	6 Nagari		1 Nagari	1 Nagari		1 Nagari		
		Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan TMMN	3 Nagari		1 Nagari	1 Nagari		0		
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok PPK yang mendapatkan Pembinaan Se kab. Lima Puluh Kota	93 Kelompok		93 Kelompok	93 Kelompok	54.85	93 Kelompok		100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Bila di disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Peraturan Perundang-undangan diatas, maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

Dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari adalah Peraturan Daerah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari diatur menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, dengan fungsi antara lain:

- Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari .
- Pembinaan dan fasilitas bidang Pemberdayaan Masyarakat lingkup Kabupaten.

- d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- e. Pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari.
- f. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.2 (T-C.30)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Nagari
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2026**

NO.	INDIKATOR	IKU	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(13)
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	-	-	√	80%	81%	82%	84%	85%	80%	81%	-	84%	84%	Tercapai
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	-	-	√	2,5%	2.5%	1.25%	1.25%	0	2,5%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	Tercapai
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	-	-	√	5%	5%	8%	10%	12%	5%	5%	11.39%	10%	10%	Tercapai

Status Nagari/Desa diukur berdasarkan kepada pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Indeks Desa Membangun bertujuan:

- a. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa.
- b. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Klasifikasi Desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM) adalah:

1. Desa Mandiri
2. Desa Maju
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal
5. Desa Sangat Tertinggal

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa adalah ukuran pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa/Nagari. Status Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan data IDM Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Status Desa/Nagari Di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023

No.	Status IDM 2023	Jumlah Nagari
1	Mandiri	18 Nagari
2	Maju	56 Nagari
3	Berkembang	4 Nagari
4	Tertinggal	1 Nagari
5	Sangat Tertinggal	0 Nagari
	Jumlah	79 Nagari

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPMD/N

Dengan adanya Program Kegiatan/Subkegiatan yang telah dilaksanakan DPMD/N maka dampaknya terhadap kinerja pelayanan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun baik dari kegiatan gotong royong maupun berupa bantuan fisik/ material sehingga swadaya masyarakat lebih baik dan meningkat dari tahun sebelumnya.
2. Tercapainya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam meningkatkan akses sumber daya baik secara fisik maupun non fisik.
3. Meningkatnya sumber daya pemangku adat di nagari dan pengetahuan kader terhadap Posyandu.
4. Meningkatnya perkembangan kelembagaan perekonomian masyarakat secara bertahap.
5. Terpenuhinya fasilitasi untuk kelancaran aktifitas perekonomian di nagari.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ini, masih ditemui permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana belum memadai.
2. Masih kurangnya kualitas SDM Aparatur Pemerintahan dan Kelembagaan di Nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
3. Terbatasnya data dan informasi tentang Lembaga Kemasyarakatan yang ada.

Pelaksanaan kegiatan secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun secara khusus menghadapi tantangan dan hambatan, diantaranya :

1. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan supaya didukung dengan pendanaan yang memadai sesuai Renja yang diajukan setiap tahunnya dari OPD, sehingga tidak terjadi pengurangan anggaran terhadap Program/Kegiatan yang direncanakan/usulkan.
2. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan Nagari, hendaknya DPMD/N didukung oleh kantor/gedung yang memadai.

Sedangkan peluang yang dimiliki dan diperlukan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan DPMD/N, antara lain :

1. Terlaksananya dengan baik kerjasama antara DPMD/N, Kecamatan dan Nagari dalam memberikan solusi dari permasalahan yang ada/muncul di Masyarakat/Nagari, dalam bentuk forum komunikasi rapat-rapat koordinasi dan peninjauan/survey ke lapangan.
2. Sumber dana yang tersedia.
3. Sambutan yang baik dan kooperatif dari stakeholder.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMD/N dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
2. Belum optimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Belum optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan sosial dan ekonomi di nagari-nagari.
4. Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam Pembangunan Nagari.
5. Rendahnya kapasitas pengelolaan pemerintahan nagari dan kelembagaan lainnya yang ada di nagari.
6. Belum berkembangnya sistem hukum dan perundang-undangan di nagari.

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Usulan Nagari dan Kecamatan diakomodir melalui Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Musrenbang RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan Renja DPMD/N Tahun 2025 juga mengakomodir Pokok–Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Aspirasi masyarakat telah menjadi perhatian serius DPMD/N dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025. Secara umum program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2025 ini sudah menampung dan mengakomodir hasil usulan dari pemangku kepentingan/masyarakat. Jika dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMD/N, usulan-usulan kegiatan dari pemangku kepentingan selaras dengan isu-isu yang dikemukakan yang salah satunya yaitu belum optimalnya pengembangan, peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan

sosial dan ekonomi di nagari-nagari.

Tabel 2.4 (T-C.32)
Usulan Program Dan Kegiatan Dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategis Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung tema RKP Nasional Tahun 2024 ini adalah :

1. Anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional.
2. Kebijakan Anggaran Belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow* program prioritas, tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata.

3. Memangkas Program yang nomenklturnya tidak jelas dan tidak ada manfaat bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli benih dan seterusnya.

Pendekatan Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah holistik, tematik, terintergrasi dan spasial. Kebijakan nasional terkait dengan pembangunan desa dibawah koordinasi Kementerian Desa, menetapkan 4 program prioritas kementerian desa. Berikut ini adalah 4 program prioritas Kementerian Desa:

1. Prukades.

Program Prukades adalah salah satu dari 4 program prioritas kementerian desa yang memiliki kepanjangan yaitu Produk Unggulan Kawasan Desa. Output dari program prukades ini tentunya adalah potensi desa yang dikenal oleh masyarakat luas.

2. Embung Desa.

Sebagian wilayah di desa masih memiliki potensi alam yang baik dan belum tercemar. Untuk itu, kementerian desa meluncurkan program embung desa.

3. BUM Desa.

Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mendorong kemandirian desa serta memperkuat usaha-usaha yang ada di desa. Hal ini karena dana desa bukan menjadi sumber utama akan tetapi menjadi stimulus untuk pembangunan desa. Kementerian Desa melalui 4 program prioritas kementerian desa ini didukung oleh BUMN dengan terbentuknya PT Mitra BUM Desa.

4. Sorga Desa

Program ini adalah program yang bertujuan untuk membangun sarana prasarana olahraga desa agar pemuda desa bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMD/N Tahun 2025

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021-2026. Dalam Renstra DPMD/N Tahun 2021-2026, dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pencapaian Misi ke-1 dan Misi ke-3 Kepala Daerah. Misi satu (1) adalah **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing Berlandaskan Keimanan**. Misi dua

(2) adalah ***Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Daerah.*** Berdasarkan hal tersebut dirumuskan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta target kinerja DPMD/N Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya fungsi dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat
2. Belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa/Nagari.
3. Kurang optimalnya pengelolaan sumberdaya nagari, potensi nagari dan Teknologi Tepat Guna.
4. Kurangnya kapasitas sumberdaya manusia aparatur Pemerintahan Nagari dalam pengelolaan keuangan dan aset desa/nagari.
5. Masih kurangnya SDM aparatur Pemerintah dan kelembagaan di Pemerintahan Nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
6. Belum tersedianya Peta Batas Desa/Nagari.
7. Belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif.
8. Indeks ketahanan social, ekonomi dan ekologi dimasing-masing nagari yang masih dalam nilai sedang (IDM).

Selanjutnya mengacu pada Renstra DPMD/N Tahun 2021-2026, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merumuskan ***tujuan*** yaitu:

1. Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya.
2. Meningkatnya Status Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan ***Sasaran*** jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja DPMD/N
Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Optimalnya Pendidikan dan Fungsi Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya	INDEK ABS ABK	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat	70%
2.	Meningkatnya Status Nagari di Sektor Ekonomi, Sosial dan Lingkungan	Indek Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.8036
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	AKIP	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	69
				Nilai IKM	87

Pada Tabel 3.1 dapat dilihat rumusan tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran beserta dengan target yang akan dicapai pada Tahun 2025. Terdapat empat (4) indikator kinerja dari rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu:

1. Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Adat dengan target sebesar 70%.
2. Indeks Desa Membangun (IDM) dengan target 0.8036.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target 69.
4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 87.

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan DPMD/N untuk Rencana Kerja DPMD/N Tahun 2025 mengacu kepada arah kebijakan dan sasaran pokok pada RPJPD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, RPJMD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan Renstra DPMD/N Tahun 2021-2026. Sehingga program, kegiatan dan sub

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program-program yang akan mendukung tercapainya target kinerja DPMD/N sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Selain itu juga memperhatikan program dan kegiatan yang akan mendukung tercapainya program nasional terkait pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri No. 00578 Tahun 2020, PMK No. 211 Tahun 2022 dan PMK No.212 Tahun 2022.

Berdasarkan uraian diatas, maka pada tahun 2025 DPMD/N akan melaksanakan program dan kegiatan rutin pada setiap SKPD dan program Urusan Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada program penunjang urusan pemerintah daerah adalah sub kegiatan yang akan mendorong target kinerja meningkatnya kualitas pelayanan dan terwujudnya reformasi birokrasi di DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada program urusan pemberdayaan masyarakat adalah sub kegiatan yang akan mendorong tercapainya sasaran peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari di Kab. Lima Puluh Kota.

Sesuai dengan rumusan tujuan, sasaran dan target kinerja Renja DPMD/N tahun 2025, maka program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 terdiri dari 1 program unggulan yaitu: Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan DPMD/N Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
				2	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Pengadaan Mebel
				2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 3.3
Program Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			3 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan tabel diatas dapat direkapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 seperti pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
DPMD/N Tahun 2025

PROGRAM	PAGU INDIKATIF	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.664.341.751,00	5	8
1 Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.621.508.000,00	1	2
Total	5.285.849.751,00	6	10

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan DPMDN Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025 serta perkiraan maju untuk Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025**

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI					5.285.849.751,00								5.157.000.000,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.285.849.751,00								5.157.000.000,00	
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5.285.849.751,00							5.157.000.000,00	
1	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	-		100 %	3.664.341.751,00						-	3.307.000.000,00	
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-		100 %	3.352.856.751,00			-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	3.000.000.000,00	
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	3.352.856.751,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		3.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	19.235.000,00			-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	25.000.000,00	
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					400 Laporan	14.985.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	-			100 %	52.350.000,00			-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	130.000.000,00	
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	42.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	25.000.000,00			-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	12.000.000,00	
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD	-			100 %	214.900.000,00			-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	-	140.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					14 Unit	174.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
2	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam penataan Nagari	-			10 %	0,00						-	150.000.000,00	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa	-			10 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	
	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
						Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa					79 Desa	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
3	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	-			100 %	0,00						-	1.190.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-			66 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-	-	1.190.000.000,00	
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa					79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				160 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa															
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa															
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD															
							Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				320 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Madani					
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
						Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				79 Desa	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa														
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				79 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
4	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Nagari/Adat	-		70 %	1.621.508.000,00							-	510.000.000,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Pemberdayaannya	-		70 %	1.621.508.000,00				-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		510.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota														
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					79 Lembaga	1.621.008.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					79 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat															
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					2 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga															
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Pengembangan Masyarakat Madani	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
											J U M L A H	5.285.849.751,00						5.157.000.000,00			

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten sampai pada Musrenbang Tingkat Provinsi dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi didalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Kerja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025. Sementara itu Renja 2025 yang disusun juga harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota 2021 sampai dengan 2026.

Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian Target Kinerja. Program dan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran.

Dalam hal pelaksanaan program kegiatan ketersediaan anggaran merupakan hal yang paling penting dalam pencapaian target kinerja. Selain itu Keberhasilan pelaksanaan Renja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur DPMD/N, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2025, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan. Demikian Rencana Kerja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di Payakumbuh
Payakumbuh, Agustus 2024

**KEPALA DPMD/N
KAB. LIMA PULUH KOTA**

ENDRA AMZAR,SH
NIP. 19680906 199603 1 001



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 050/314 /BUP-LK/ X / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya; dan
 - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun

2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Administrasi Umum;
- e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, menulis dan menyetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2024 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 26 November 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 050/314 /BUP-LK/ X /2023

TANGGAL : 28 NOVEMBER 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Otonomi Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Mental Spiritual	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Masyarakat	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perundang-undangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan Hukum	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi dan Informasi	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Program	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Program	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	dan Pelaporan	
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Advokasi Barang/Jasa	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlengkapan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rumah Tangga	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Publik dan Tata laksana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Komunikasi Pimpinan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi Pimpinan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelaporan	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rumah Tangga	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kajian Perundang-undangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Humas, Protokol dan Publikasi	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Penganggaran	
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitas Pengawasan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Kebijakan	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Sub Koordinator Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Sub Koordinator Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Sub Koordinator Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Sub Koordinator Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Sub Koordinator Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Sub Koordinator Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Sub Koordinator Pendidikan Non Formal	Anggota
	Sub Koordinator PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Sub Koordinator Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Sub Koordinator Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Sub Koordinator Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Sub Koordinator Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Sub Koordinator Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Sub Koordinator Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Sub Koordinator Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Sub Koordinator Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Sub Koordinator Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Sub Koordinator Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Sub Koordinator Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Sub Koordinator Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Sub Koordinator Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Sub Koordinator Pertanahan	Anggota
	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Sub Koordinator Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Sub Koordinator Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kepala Bidang Trantib	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang PPUD	Anggota
	Kepala Bidang SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Sub Koordinator Intelijen	Anggota
	Sub Koordinator Trantib & Pengamanan	Anggota
	Sub Koordinator Operasional & Logistik	Anggota
	Sub Koordinator Bina Potensi	Anggota
	Sub Koordinator Data Informasi	Anggota
	Sub Koordinator Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Sub Koordinator Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Sub Koordinator Penegakan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sub Koordinator Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Sub Koordinator Pelatihan Dasar	Anggota
	Sub Koordinator Teknis Fungsional	Anggota
	Sub Koordinator Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Sub Koordinator Pencegahan Dan Inspeksi	Anggota
	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Aparatur	Anggota
	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Dan Dunia Usaha	Anggota
	Sub Koordinator Pengendalian Operasi Dan Komunikasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemadam Dan Investigasi	Anggota
	Sub Koordinator Penyelamatan Dan Evakuasi	Anggota
	Sub Koordinator Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Sub Koordinator Pemeliharaan Dan Perawatan Sarana	Anggota
	Sub Koordinator Informasi Dan Pengelolaan Data	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Sub Koordinator Perlindungan Sosial bagi Korban	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	
	Sub Koordinator Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Sub Koordinator Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Sub Koordinator Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Sub Koordinator Identitas Penduduk	Anggota
	Sub Koordinator Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Sub Koordinator Pendataan Penduduk	Anggota
	Sub Koordinator Kelahiran	Anggota
	Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian	Anggota
	Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian	Anggota
	Sub Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Sub Koordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Sub Koordinator Kerjasama	Anggota
	Sub Koordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Sub Koordinator Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Sub Koordinator Pengendalian Penduduk	Anggota
	Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Sub Koordinator Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Sub Koordinator Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Sub Koordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Sub Koordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Sub Koordinator Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Sub Koordinator Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Sub Koordinator Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sub Koordinator Promosi	Anggota
	Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Sub Koordinator Data dan Informasi	Anggota
	Sub Koordinator Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Sub Koordinator Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Sub Koordinator Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Sub Koordinator Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Sub Koordinator Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Sub Koordinator Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Sub Koordinator Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Sub Koordinator Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Sub Koordinator Metrologi	Anggota
	Sub Koordinator Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
	Sub Koordinator Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Sub Koordinator Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Sub Koordinator Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Sub Koordinator Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Sub Koordinator Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Sub Koordinator Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Sub Koordinator Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Sub Koordinator Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Sub Koordinator Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Sub Koordinator Perizinan dan Data	Anggota
	Sub Koordinator Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Sub Koordinator Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Sub Koordinator Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Sub Koordinator Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Sub Koordinator Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Sub Koordinator Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Sub Koordinator Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Sub Koordinator Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Sub Koordinator Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Anggota
	Sub Koordinator Pengelola Media Komunikasi Publik	Anggota
	Sub Koordinator Layanan Hubungan Media Dan Kehumasan	Anggota
	Sub Koordinator Tata Kelola Pemerintahan Berbasis	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Elektronik	
	Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Anggota
	Sub Koordinator Aplikasi	Anggota
	Sub Koordinator Statistik Sektor Ekonomi Dan Infastruktur	Anggota
	Sub Koordinator Statistik Sektor Pemerintahan Dan Sosial	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Sub Koordinator Identifikasi Deteksi Dan Proteksi Keamanan SIBER	Anggota
	Sub Koordinator Penanggulangan Pemulihan Pemantauan Dan Pengendalian	Anggota
	Sub Koordinator Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Sub Koordinator Promosi dan Informasi	Anggota
	Sub Koordinator Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Sub Koordinator Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Sub Koordinator Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Sub Koordinator Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Sub Koordinator Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Sub Koordinator Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Sub Koordinator Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Sub Koordinator Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Sub Koordinator Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Sub Koordinator Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Sub Koordinator Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Sub Koordinator Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Sub Koordinator Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Sub Koordinator Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Sub Koordinator Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Sub Koordinator Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Sub Koordinator Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Sub Koordinator Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Sub Koordinator Lalu Lintas	Anggota
	Sub Koordinator Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Sub Koordinator Pengujian Sarana	Anggota
	Sub Koordinator Angkutan	Anggota
	Sub Koordinator Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Sub Koordinator Perawatan Prasarana	Anggota
	Sub Koordinator Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Sub Koordinator Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Sub Koordinator Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Sub Koordinator Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Sub Koordinator Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Sub Koordinator Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Sub Koordinator Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Sub Koordinator Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Sub Koordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Sub Koordinator Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Sub Koordinator Perumahan	Anggota
	Sub Koordinator Kawasan Permukiman	Anggota
	Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Distanhorbun	Ketua
	Sekretaris Distanhorbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasubag Keuangan Dan Aset	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Sub Koordinator Pupuk Dan Pestisida	Anggota
	Sub Koordinator Sumber Daya Genetik	Anggota
	Sub Koordinator Alat Dan Mesin Pertanian	Anggota
	Sub Koordinator Pengembangan Prasarana	Anggota
	Sub Koordinator Irigasi	Anggota
	Sub Koordinator Infrastruktur Pertanian	Anggota
	Sub Koordinator Perlindungan Tanaman	Anggota
	Sub Koordinator Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Bencana Alam	Anggota
	Sub Koordinator Perizinan Dan Pembinaan Usaha	Anggota
	Sub Koordinator Kelembagaan	Anggota
	Sub Koordinator Ketenagaan	Anggota
	Sub Koordinator Penyelenggaraan Penyuluhan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Sub Koordinator Non Ruminansia	Anggota
	Sub Koordinator Ruminansia	Anggota
	Sub Koordinator Perbibitan	Anggota
	Sub Koordinator Kesmavet	Anggota
	Sub Koordinator Kesehatan Hewan	Anggota
	Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Sub Koordinator Pakan	Anggota
	Sub Koordinator Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Sub Koordinator Lahan dan Irigasi	Anggota
	Sub Koordinator Kelembagaan	Anggota
	Sub Koordinator Metode dan Infomasi	Anggota
	Sub Koordinator Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
22. DINAS PERIKANAN		
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Sub Koordinator Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah	Anggota
	Sub Koordinator Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Sub Koordinator Pengendalian Mutu Pembudiyaan Ikan	Anggota
	Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Sub Koordinator Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Sub Koordinator Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Sub Koordinator Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Sub Koordinator Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Sub Koordinator Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Sub Koordinator Ketersediaan Pangan	Anggota
	Sub Koordinator Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Sub Koordinator Kerawanan Pangan	Anggota
	Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Sub Koordinator Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Sub Koordinator Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Sub Koordinator Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Sub Koordinator Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Sub Koordinator Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Sub Koordinator Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Sub Koordinator Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Sub Koordinator Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Sub Koordinator Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Sub Koordinator Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Sub Koordinator Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Sub Koordinator Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Sub Koordinator Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Sub Koordinator Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Sub Koordinator Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Sub Koordinator Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Sub Koordinator Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Sub Koordinator Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
	Sub Koordinator Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM		
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Sub Koordinator Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Sub Koordinator Kepangkatan	Anggota
	Sub Koordinator Mutasi	Anggota
	Sub Koordinator Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Sub Koordinator Status ASN	Anggota
	Sub Koordinator Informasi ASN	Anggota
	Sub Koordinator Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27. BADAN KEUANGAN		
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Sub Koordinator Bina Ideologi	Anggota
	Sub Koordinator Bina Wasbang	Anggota
	Sub Koordinator Bintang, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Sub Koordinator Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini	Anggota
	Sub Koordinator HAL Dan Fasilitasi Pemilu	Anggota
	Sub Koordinator Fasilitasi Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Sub Koordinator Pencegahan	Anggota
	Sub Koordinator Kesiapsiagaan	Anggota
	Sub Koordinator Kedaruratan	Anggota
	Sub Koordinator Logistik	Anggota
	Sub Koordinator Rehabilitasi	Anggota
	Sub Koordinator Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
30.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Sub Koordinator Sarana Prasarana Dan Logistik	Anggota
	Sub Koordinator Perencanaan Dan Pelaporan	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan Penunjang Non Medis Dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan Medis	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
31.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemerintahan	Anggota
	Sub Koordinator Pembangunan dan Pemberdayaan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Masyarakat	
	Sub Koordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
32.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemerintahan	Anggota
	Sub Koordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Sub Koordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
33.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemerintahan	Anggota
	Sub Koordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Sub Koordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
34.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemerintahan	Anggota
	Sub Koordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Sub Koordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota

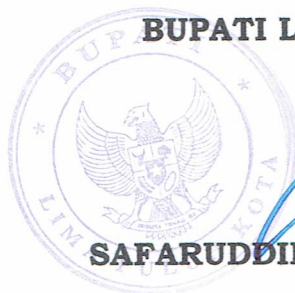
No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
35.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemerintahan	Anggota
	Sub Koordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Sub Koordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
36.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemerintahan	Anggota
	Sub Koordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Sub Koordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
37.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemerintahan	Anggota
	Sub Koordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Sub Koordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
38.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemerintahan	Anggota
	Sub Koordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Sub Koordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
39.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemerintahan	Anggota
	Sub Koordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Sub Koordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
40.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemerintahan	Anggota
	Sub Koordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Sub Koordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
41.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemerintahan	Anggota
	Sub Koordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Sub Koordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
42.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemerintahan	Anggota
	Sub Koordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Sub Koordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
43.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Sub Koordinator Pemerintahan	Anggota
	Sub Koordinator Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Sub Koordinator Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Sub Koordinator Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 20 November 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO